

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Pengertian akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* dalam Harahap (2003: 45) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Menurut Arens dan Loebbecke (2002:3) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai berikut:

*“Accounting is the process of recording classifying, and summarizing economic is a logical manner for the purpose of providing financial information for decision making”*

Definisi Akuntansi Menurut *American Accounting Association* dalam Ely Suhayati (2009:2) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomis, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”

Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi merupakan proses yang berhubungan dengan informasi ekonomis yang sesuai logika dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang jelas dan tegas.

### **2.1.2 Fungsi Akuntansi**

Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/ manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

### **2.1.3 Laporan Dasar Akuntansi**

Pada dasarnya proses akuntansi akan membuat output laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca pada suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Pada suatu laporan akuntansi harus mencantumkan nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal penyusunan atau jangka waktu laporan tersebut untuk memudahkan orang lain memahaminya. Laporan dapat bersifat periodik dan ada juga yang bersifat suatu waktu tertentu saja.

## **2.2 Sistem Informasi Akuntansi**

### **2.2.1 Sistem**

Definisi sistem menurut James A. Hall (2007) adalah sebagai berikut :

*“Sistem is a group of two or more interrelated components or subsystems that server a common purpose”.*

Sedangkan dfinisi Sistem menurut Azhar Susanto (2009:18) adalah sebagai berikut :

*“Sistem adalah kumpulan dari subsistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu”.*

Dari kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem merupakan bagian-bagian dalam apapun baik fisik ataupun non fisik untuk memudahkan dalam mencapai tujuan tertetu.

### **2.2.2 Informasi**

Definisi informasi menurut Marhall B. Romney & Paul J. Steinbart (2011:25) adalah sebagai berikut:

*“Information is data have been organized and processed to provide meaning and improove the decision-making process. As a rule, users make betterdecisions as the quantity and quality of information increase”.*

Definisi informasi menurut Mardi (2011:13) adalah sebagai berikut:

*“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan*

lebih berarti bagi yang menerimanya”.

Definisi informasi menurut Kusri (2007:7) adalah sebagai berikut:

“Informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berguna bagi pengguna yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi”.

Dari ketiga definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Informasi merupakan data yang telah diolah dan nantinya akan menjadi bentuk yang berguna untuk pengambilan keputusan.

### **2.2.3 Sistem Informasi**

Definisi Sistem Informasi menurut James A. Hall (2007:4) adalah sebagai berikut:

*“Information sistem is the set of formal procedures by which data are collected, processed into information, and distributed to users”*

Menurut Laudon dalam Azhar Susanto (2009:55) pengertian Sistem Informasi adalah sebagai berikut :

“Sistem Informasi adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mengumpulkan, memproses, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan”.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan dalam kegiatan operasional dalam organisasi tersebut.

#### **2.2.4 Sistem Informasi Akuntansi**

Definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut Jogiyanto (2005: 17) adalah sebagai berikut:

“Sekumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengendalian dan perencanaan sekarang dan operasi masa depan serta pelaporan eksternal kepada pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak lainnya”.

Sedangkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2009:124) adalah sebagai berikut:

“Sistem Informasi Akuntansi dapat di definisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto. Dari Definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber, seperti manusia dan peralatan yang didesain untuk mengubah data dan informasi yang menjadi dasar bagi para pemakai untuk mengambil keputusan dalam merencanakan, mengendalikan dan mengoprasikan.

#### **2.2.5 Dimensi Sistem Informasi Akuntansi**

Adapun komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2009:193-245), adalah sebagai berikut:

1. *Hardware*
2. *Software*
3. *Brainware*
4. *Prosedur*
5. *Database*
6. *Jaringan*
7. *Komunikasi*

Dari pengertian komponen-komponen Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2009:193-245), penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. *Hardware*

*Hardware* merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk Informasi. Bagian –bagian *hardware* terdiri atas :

##### A. Bagian Input

Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data kedalam komputer seperti, *keyboard, mouse, scanner*, dll.

##### B. Bagian Pengolahan

CPU (*Central Prossesing Unit*) yang selama ini mungkin kita kenal adalah merupakan rumah atau (*box*) dari komponen-komponen lainnya, seperti :

- a. *Processor* (otak computer)
- b. *Memory*
- c. *Motherboard*
- d. *Hardisk*
- e. *Floppy disk*
- f. *CD ROM*
- g. *Expansion slot*
- h. *Devices controller (multi I/O, VGA card, Sound card)*
- i. *Komponen lainnya (fan, baterai, conector, dll)*
- j. *Power supply*

##### C. Bagian Output

Peralatan Output merupakan peralatan – peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Beberapa macam peralatan output yang sering digunakan seperti : *printer, layar monitor, speaker LCD*, dll.

##### D. Bagian Komunikasi

Peralatan komunikasi adalah peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bias berjalan dengan baik. Seperti, *Network card* untuk LAN, *wireless LAN*, dan lain-lain.

## 2. *Software*

*Software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada Komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis.

## 3. *Brainware*

SDM Sumber Daya Manusia dan SIA Sistem Informasi Akuntansi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi. Pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. *Brainware* dikelompokkan sebagai berikut :

## 4. *Prosedur*

Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

## 5. *Database*

Sistem *database* merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan.

## **2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah**

### **2.3.1 Kualitas**

Tjiptono (2010:34) mengemukakan bahwa kualitas merupakan: "...suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Terdapat 5 (lima) sumber kualitas yang dijumpai yaitu:

1. Program, kebijakan, dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak.
2. Sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu maupun detail.
3. Desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif produk sebelum dilepas ke pasar.

4. Kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara dengan baik, pekerja yang terlatih dengan baik, dan penemuan penyimpangan secara cepat.
5. Manajemen yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama”.

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:744) adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar.

Menurut Goetch dan Davis dalam Dorothea Wahu Ariani (2004:23), Kualitas adalah: “...suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan”.

Dalam ISO-8402 (Loh, 2009:35), Pengertian Kualitas adalah:

“...keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu”.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah sebuah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, pelayanan, serta kemampuan dalam memuaskan kebutuhan.

### **2.3.2 Laporan Keuangan Pemerintah**

Ada beberapa definisi dari Laporan keuangan baik laporan keuangan secara umum maupun laporan keuangan bagi institusi pemerintahan. Heri (2012:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Kasmir (2012:45) Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan entitas pada periode tertentu laporan keuangan juga menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan kedepan dengan melihat persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan guna mengambil keputusan ekonomi.

Nordiawan dkk, 2012 menyatakan bahwa laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola. Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal.

Dari pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya.

### **2.3.3 Fungsi Laporan Keuangan**

Menurut Susan Irawati (2008:145) Fungsi laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan informasi yang berguna, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau kondisi *financial* sebuah perusahaan, penilaian terhadap sehat tidaknya suatu perusahaan”.

Fungsi laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, dengan demikian keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan tegas untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.

### **2.3.4 Tujuan Laporan Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan memuat Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan keuangan (KDPPLK) yang diadopsi dari *conseptuual*

*framework* IASC. KDPPLK menyatakan bahwa tujuan laporan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (paragraf 12) dikutip dari Wahyuni (2013)

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan. (Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan)

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna dalam evaluasi keputusan dan sebagai alat ukur akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pembuat keputusan baik secara ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah
- (b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumberdaya ekonomi kewajiban ekuitas dana pemerintah
- (c) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan alokasi nya penggunaan sumber daya ekonomi
- (d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya
- (f) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

- aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas.
- (g) Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
  - (h) Informasi yang berguna untuk evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendandai aktvitasnya

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna (paragraf 14) dikutip dari (Wahyuni 2013).

Sedangkan menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:30), tujuan laporan keuangan dimulai dari yang paling umum, kemudian bergerak ke tujuan yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1. “Informasi yang Bermanfaat untuk Pengambilan Keputusan
2. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas untuk Pemakai Eksternal
3. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas Perusahaan”.

Adapun penjelasan mengenai ketiga tujuan tersebut menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2009:32) adalah sebagai berikut:

- a. “Informasi yang Bermanfaat untuk Pengambilan Keputusan  
Tujuan yang paling umum adalah bahwa pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor, kreditor, dan pemakai lainnya, saat ini maupun potensial (masa mendatang), untuk pembuatan keputusan investasi, kredit, dan investasi semacam lainnya.
- b. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas untuk Pemakai *Eksternal*.  
Tujuan kedua ini menyatakan laporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian (yang berarti risiko) penerimaan kas yang berkaitan. Tujuan ini penting, karena investor atau pemakai eksternal

mengeluarkan kas untuk memperoleh aliran kas masuk. Pemakai eksternal harus yakin bahwa ia akan memperoleh aliran kas masuk yang lebih dari aliran kas keluar. Pemakai eksternal harus memperoleh aliran kas masuk bukan hanya yang bisa mengembalikan aliran kas keluar (*return on investment*), tetapi juga aliran kas masuk yang bisa mengembalikan return yang sesuai dengan risiko yang ditanggungnya. Laporan keuangan diperlukan untuk membantu menganalisis jumlah dan saat/waktu Penerimaan kas (yaitu dividen, bunga) dan juga memperkirakan risiko yang berkaitan.

- c. Informasi yang Bermanfaat untuk Memperkirakan Aliran Kas Perusahaan. Penerimaan kas pihak eksternal akan ditentukan oleh aliran kas masuk perusahaan. Perusahaan yang kesulitan kas akan mengalami kesulitan untuk memberi kas ke pihak eksternal, dan dengan demikian Penerimaan kas pihak eksternal akan terpengaruh”.

### **2.3.5 Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing – masing kelompok pengguna. Laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang di tentukan oleh perundang undangan. PP No.24 tahun 2005 paragraf 14 kemudian diperbaharui dengan peraturan pemerintah menurut PP no. 71 Tahun 2010 sehingga terdapat beberapa penambahan komponen laporan keuangan pemerintah, menurut Abdul Halim dan Syam Kusufi (2013:267) menyatakan terdapat empat komponen laporan keuangan sebagai berikut:

- a) “Laporan Realisai Anggaran (LRA)  
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatanRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL)  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos

berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut:

1. kas dan setara kas
2. investasi jangka pendek
3. piutang pajak dan bukan pajak
4. persediaan
5. investasi jangka panjang
6. aset tetap
7. kewajiban jangka pendek

#### 8. kewajiban jangka panjang

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

#### d) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan
2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/ amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian

laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
- b. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
- c. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan”.

### **2.3.6 Dimensi Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Keempat karakteristik berikut

ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. “Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu :

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendal. Informasi yang melatarbelakangi setiap formasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas ada kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjuk kan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- d. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

e. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud”.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Penelitian Terdahulu No</b>	<b>Peneliti dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil penelitian</b>
1	Oktrianda (2005)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Pada Akuntabilitas Kinerja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris kompetensi aparatur pemerintah, penerapan akuntabilitas keuangan dan

		Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Dumai	ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
2	Zirman (2010)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, dan motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja
3	Warisno (2009)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Secara simultan kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintahan Provinsi Jambi. Namun secara parsial, sarana pendukung dan komitmen organisasi tidak

			berpengaruh secara signifikan terhadap
4	Luh Putu Virra Indah Perdanawati (2014)	Pengaruh unsur-unsur kepuasan pengguna pada efisiensi dan efektivitas kerja pengguna aplikasi sistem akuntansi di satuan kerja pendidikan tinggi di Provinsi Bali	Unsur-unsur kepuasan pengguna secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kerja pengguna aplikasi sistem akuntansi. Variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi kerja pengguna adalah kelengkapan fungsi dan fleksibilitas, sedangkan pada variabel efektivitas kerja pengguna, hanya variabel keamanan yang berpengaruh secara signifikan.
5	Robbyta (2012)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan sitem pelaporan dan Ketaatan peraturan perundangan berpengaruh positif dan

			signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.
--	--	--	--

## **2.5 Kerangka Pemikiran**

### **2.5.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.**

Menurut Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon dalam Ratih Purnamasari (2015) menyatakan bahwa dengan perangkat kualitas sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, juga digunakan oleh pengguna dalam membuat keputusan.

Selain itu, menurut James A. Hall dalam Amir Abadi Yusuf (2007:6) menyatakan bahwa sistem Informasi akuntansi yang baik dapat menambah nilai laporan keuangan dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu.

Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari unsur- unsur sistem informasi akuntansi yang didasarkan pada input yang baik dan output yang baik. Kedua aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. (Kurniawan, 2011).

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, paket undang-undang ini merupakan awal bagi lahirnya peraturan-peraturan pengelolaan keuangan daerah yang lebih harmonis dengan pengelolaan keuangan negara secara umum. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh peraturan yang lebih teknis tentang pengelolaan keuangan Daerah yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (yang baru saja disempurnakan dengan terbitnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (yang baru saja disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Tujuan dari lahirnya peraturan-peraturan keuangan ini jelas, yaitu terciptanya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistem informasi Akuntansi merupakan sebuah subsistem dari Sistem Informasi Manajemen, atau dapat disebutkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan pendukung suatu organisasi untuk menjadi kokoh. Setiap hari

teknologi akan berkembang, maka sistem informasi pun, terutama Sistem Informasi Akuntansi akan turut mengalami pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem dapat diawali dengan melakukan analisis terhadap sistem, kemudian mendesain konseptual dan fisik sistem tersebut. Selanjutnya adalah implementasi sistem dan diakhiri dengan pemeliharannya (Romney & Steinbart, 2011).

Menurut Azhar Susanto menyatakan bahwa :

“ Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan yaitu pengolahan data menjadi informasi yang berguna”.

Data yang dimiliki setiap organisasi sangat beragam dan salah satunya adalah data keuangan yang memberikan informasi tentang keuangan dalam bentuk suatu laporan keuangan dimana laporan tersebut dibuat kedalam suatu periode untuk perusahaan dan data keuangan ini disusun dan dibuat di bagian akuntansi.

Menurut *American Accounting Association* (1966), Wikinson (2000), Warren dan Fess (1966), yang dikutip oleh Azhar Susanto (2005:74) menjelaskan bahwa:

“Akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktifitas atau operasi peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi”.

Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem informasi yang berbeda dengan sistem informasi lainnya namun tetap saling berhubungan, data yang diberikan sistem informasi berupa data akuntansi yang diolah dan biasanya berupa

jumlah nominal sebuah uang, setiap perusahaan memiliki bagian akuntansi yang dimana bagian tersebut mencatat semua laporan – laporan keuangan yang masuk, Sistem informasi akuntansi sebagai bagian yang terpenting di setiap perusahaan karena merupakan suatu tahapan penyusunan laporan atau prosedur dalam suatu organisasi alur alir dokumen yang setiap kegiatannya menghasilkan informasi akuntansi yang memiliki tujuan yang spesifik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto menyatakan bahwa:

“Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan (integritas) dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab, pemerintah daerah yang mengeluarkan harus secara eksplisit menyatakan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai.

Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
  - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c. Tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
2. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi.

setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

3. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat Diverifikasi, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### 4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang

sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akauntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

#### 5. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntansi daerah. Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan SAP saja, tetapi juga dari sistem informasi akuntansi.

Untuk itu, pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan dan memelihara sistem informasi akuntansi yang baik dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang andal.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sari dkk, 2014).

Penelitian Sari, dkk (2014) menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini di dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah Kabupaten Jembrana diharapkan dapat memudahkan proses penyusunan laporan keuangan dan memberikan manfaat bagi pemerintah demi mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

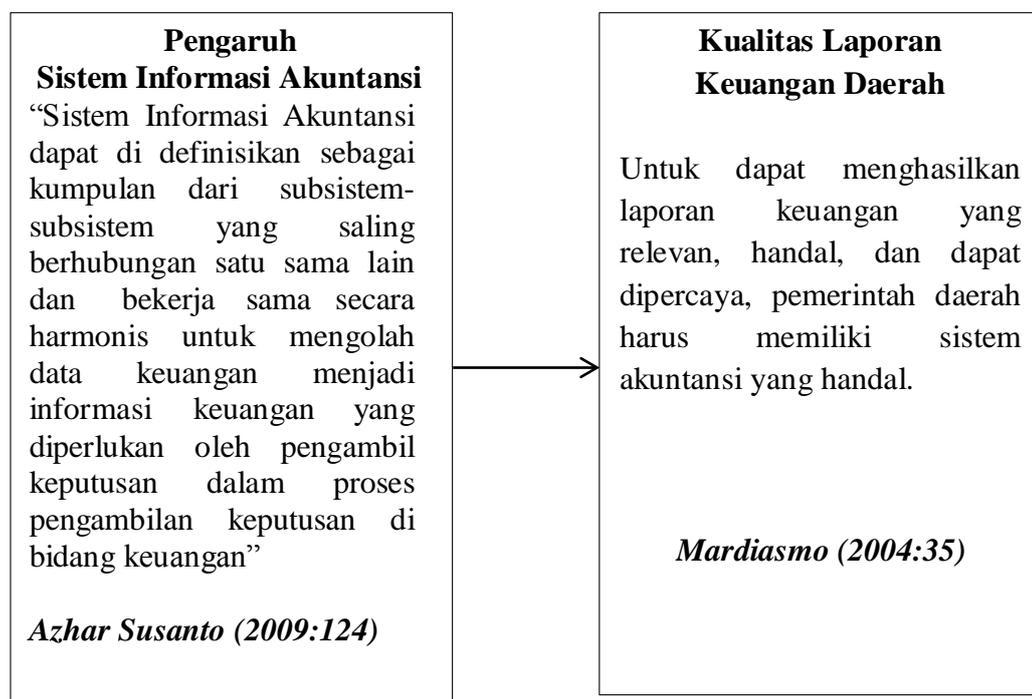
Yuliani, dkk (2010) menemukan hasil bahwa ada pengaruh signifikan positif pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. setiap dilakukan peningkatan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Informasi Akuntansi keuangan Daerah yang handal akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya.

Dengan demikian diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Untuk memperjelas pengaruh dari masing-masing variabel tersebut, maka disajikan model sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

#### **2.6 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Saling ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Unsur- unsur sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.